

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia memiliki pengalaman historis yang cukup panjang terkait insiden penularan wabah penyakit yang meluas di masa lampau seperti penyakit pes, influenza, dan kolera. (Eric, 2014) menyatakan bahwa awal mula ditemukannya kolera yaitu pada dekade kedua abad ke-19 di Arab Saudi yang kemudian mewabah ke Indonesia melalui aktivitas pengiriman jamaah haji dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal laut. Demikian pula dengan (Boomgaard, 1993) yang menyebutkan bahwa influenza sebagai suatu imbas dari peningkatan aktivitas perdagangan maritim Eropa dengan Hindia Belanda yang mewabah pada awal dekade abad ke-20. Selanjutnya (Mahandis, 2020) mengatakan bahwa penyakit pes disebabkan oleh tikus yang terbawa oleh impor beras dari Myanmar.

Dewasa ini, bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan akibat kemunculan suatu penyakit menular jenis baru. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia terparap virus pasca pengumuman pemerintah pada bulan Maret 2020. Terhitung mulai 31 Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) Republik Rakyat China (RRC) *Country Office* melaporkan adanya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada Januari tahun 2020, RRC mengidentifikasi pneumonia yang belum diketahui etiologinya, Republik Rakyat China (RRC) mengidentifikasikan virus tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). (Yunus, N. R., & Rezki, 2020) menjelaskan Coronavirus adalah subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga ordo *Nidovirales* dan *Coronaviridae* yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Corona virus jenis baru yang muncul di Wuhan China pada Desember 2019 kemudian ditemukan pada manusia dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). SARS-COV2 dapat menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). (ZA, Safrizal. Putra, DI. Sofyan, Safriza. MPH, 2021)

Halida Alda Intifadah, 2022

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menambahkan bahwa pada Januari 2020 *Network Control Protocol* (NCP) mulai menjadi pandemi dalam cakupan global dan menjadi suatu problem kesehatan di beberapa negara di luar Republik Rakyat China (RRC).

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika dan tantangan baru yang harus diatasi oleh negara dan bangsa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Diakses dari berita liputan6.com oleh (Flora, 2021) peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini mencapai 1.006.313 orang. Hal ini berkaitan dengan respons dan tanggung jawab Negara untuk mencari strategi pencegahan dan pemberhentian penyebaran virus COVID-19 agar tidak menyebar luas. Keadaan ini telah menimbulkan ancaman keamanan bagi manusia sebagai warga negara (*human security*) sekaligus bagi pemerintah dan negara (*state security*) bahkan lingkup yang lebih luas lagi, yakni secara global (*global security*). Sebagai pandemi, global, COVID-19 telah menguji ketahanan manusia, pemerintah dan juga negara dalam mengatasi krisis. Tidak hanya memperhatikan pada ancaman terhadap isu-isu kesehatan yang menjadi fokusnya yang utama, tetapi juga di hadapkan pada kedua situasi penting, yaitu situasi sosial dan ekonomi yang ikut terdampak secara serius. Segala upaya terus dilakukan oleh negara sebagai strategi penanggulangan persebaran virus COVID-19 yang telah menelan korban jiwa relatif banyak, termasuk sistem kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau kebijakan *semi lockdown* yang terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan kasus COVID-19. Kebijakan lain *social distancing*, yaitu *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat di Indonesia sejak Maret tahun 2020, dilakukan berbagai ajakan dari kepala negara (presiden), pimpinan lembaga negara, dan tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. (Masnun, Muh. Ali, Sulistyowati, Eny. Ronaboyd, 2021) menyebutkan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh negara diharapkan mampu menanggulangi persebaran COVID-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran pada masyarakat atas kebijakan tersebut tergolong relatif rendah.

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kebijakan negara yang terukur rendah menuntut pemberlakuan intervensi, tidak hanya dalam hal penerapan protokol kesehatan saja tetapi juga memerlukan intervensi lain yang dianggap lebih efektif untuk menghentikan mata rantai penularan penyakit COVID-19, salah satunya melalui riset penghasil vaksin. Sudah ada beberapa Negara didunia yang berupaya dan bersaing untuk menghasilkan vaksin yang akurat. Vaksin dapat menjadi penanggulangan pandemi, vaksin akan menjadi salah satu barang komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Maka akan sangat lumrah apabila semua Negara berusaha menemukan vaksin. Negara-negara besar yang telah maju dalam melakukan riset vaksin COVID-19 diantaranya sebagai berikut: Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Australia, Jerman, dan juga Rusia. Riset-riset tersebut mungkin dapat disebutkan sebagai langkah paling awal dalam perang dagang antara Negara-negara besar adi kuasa.

Negara Indonesia secara mandiri telah melakukan upaya penyelenggaraan vaksinasi mulai dari *pertama* pendanaan, *kedua* pengadaan dan *ketiga* distribusi termasuk elaborasi dan hubungan antar Lembaga dan Kementerian yang dilaksanakan secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Indonesia Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang ditandatangani oleh beliau pada 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan Presiden ini mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) untuk melakukan penyediaan dan pelaksanaan vaksin. Upaya pemerintah dalam menekan dan menghentikan penyebaran kasus positif COVID-19 harus sesuai dengan rencana, termasuk program vaksinasi. Pemerintah meyakini target vaksinasi bagi tenaga kesehatan, lanjut usia (umur 30-59 tahun), asisten negara (ASN), dan perangkat desa akan berjalan sesuai rencana. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh negara Indonesia untuk mengembangkan vaksin yang ideal guna pencegahan infeksi SARS-CoV-2 melalui berbagai platform, yaitu vaksin *inactivated virus vaccines* atau inaktivasi, vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin subunit protein, dan vaksin seperti virus (*virus-like vaccine*).

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di lingkungan masyarakat (*herd immunity*), mengurangi penularan atau transmisi COVID-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, serta melindungi masyarakat dari virus COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok (*herd immunity*) hanya bisa terbentuk apabila cakupan dari vaksinasi tinggi dan tersebar secara merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemberian program vaksinasi jika ditinjau dari segi ekonomi akan jauh lebih hemat anggaran, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Menurut (PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), 2021) dengan adanya kekebalan kelompok di lingkungan masyarakat (*herd immunity*), maka akan menjadi *seasonal disease*, yakni penyakit musiman yang dapat dicegah dengan vaksin.

Dalam suatu komunitas masyarakat akan selalu terdapat ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan yang diarahkan kepada negara. Begitupun dengan kebijakan vaksinasi yang memiliki landasan hukum terkait dengan pemenuhan hak warga negaranya. Jika ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kesehatan publik yang didapatkan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pemerintahan yang sah. Kesehatan merupakan salah satu indikator hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Bagi sebagian pribadi/individu, apabila pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menjalankan vaksinasi, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan “hak” pribadi. Namun yang harus diperhatikan, setiap kebebasan yang dimiliki individu tentunya memiliki batasan-batasan. Menurut (Mill, 2005) batasan kebebasan dari setiap pribadi/individu yaitu berhak untuk bertindak berdasarkan kehendaknya selama tindakannya tidak merugikan orang lain.

Dalam konteks ini, dikhawatirkan masyarakat yang masih enggan melakukan vaksinasi berpotensi melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak untuk melakukan vaksinasi dapat menimbulkan risiko dan mengancam

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya. Individu yang menolak untuk divaksinasi secara hukum bertanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang telah dipilihnya. (Wulandari, 2021) mengartikan orang lain berhak menjadikan pribadi/individu yang menolak vaksinasi bertanggung jawab karena ketidakpatuhannya dapat membahayakan orang lain.

Proses penyediaan akses vaksin dan vaksinasi merupakan kolaborasi dari berbagai elemen bangsa dan negara, dengan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai salah satu elemen penting dalam negara berupaya memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat untuk mendorong percepatan pemulihan kesehatan. Kedatangan vaksin menjadi kabar baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, vaksin dapat menjadi jaminan untuk terus melaksanakan program vaksinasi yang sangat penting untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Vaksinasi juga harus dibarengi dengan disiplin 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan penguatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) adalah langkah penting untuk membuka berbagai peluang dalam membangkitkan tingkat produktivitas, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengakhiri pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap disiplin dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, baik yang sedang berjalan maupun yang belum berjalan karena protokol kesehatan dapat melindungi individu dan orang sekitar dari penularan COVID-19 karena vaksin sudah didistribusikan keseluruh wilayah di Indonesia.

Kasus COVID-19 telah melanda tanah air dalam satu tahun terakhir sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret silam. Hingga saat ini, kasus penyebaran virus yang pertama kali disebut-sebut menyebar di Wuhan, China, masih terjadi di masyarakat dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Begitu pula dengan kasus persebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang terus meningkat, perkembangan kasus aktif dan kematian sehingga pemerintah setempat berupaya untuk menangani kasus ini dengan sebaik mungkin.

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Perkembangan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat per Maret 2020 hingga Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Data Perkembangan Kasus COVID-19 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat

| No | Data Awal   | Sumber   | Waktu           | Keterangan  |
|----|---|--|-----------------|---|
| 1. | 9 kasus baru muncul saat swab massal diseluruh kecamatan di Kabupaten Kuningan dimana mayoritas yang terpapar adalah aparat desa. Kemudian kasus lainnya meningkat menjadi 54 orang positif terpapar setelah melakukan 4 kali swab massal.  | Berita dari detik.news oleh (D. Bagaskara, 2020) berdasarkan data dari situs resmi <i>covid19.kuningan.go.id</i> | 26 Maret 2020   | Kasus pertama muncul saat salah seorang warga Kuningan yang berada di Jakarta meninggal dunia karena dinyatakan positif COVID-19. Sejak saat itu kasus positif bertambah karena banyak warga Kuningan yang mulai datang dari luar daerah, puncaknya saat menjelang hari raya Idul Fitri yang totalnya mencapai 80 ribu orang pemudik.   |
| 2. | Juru bicara satgas COVID-19 Kabupaten Kuningan yaitu Agus Mauludin mengatakan ada penembahan 238 kasus kasus positif di Pondok Pesantren Khusnul Hotimah, Kuningan, Jawa Barat. Sehingga total kluster kasus positif Covid-19 mencapai 405 orang dan masih bisa bertambah karena belum semua siswa melakukan swab test. | Berita dari Kompas.id oleh (Ashri, 2020)   | 6 Oktober 2020  | Penemuan kasus Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan diawali dengan gelombang santri yang berdatangan pada agustus 2020. Pondok Pesantren mewajibkan santri dan guru menjalani tes untuk mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19. Kedatangan santri juga dibagi menjadi 3 tahap/gelombang. Namun, kasus positif di Pondok Pesantren merebak ketika beberapa santri menunjukan gejala seperti demam, batuk, flu, dan kehilangan indra penciuman pada pertengahan September. |
| 3. | Penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kuningan   | Berita dari detik.news oleh (B.  | 3 Februari 2021 | Selain lonjakan kasus positif baru, jumlah kematian juga melonjak   |

Halida Alda Intifadah, 2022

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

|    |   |  |             |   |
|----|---|--|-------------|---|
|    | Jawa Barat mengalami lonjakan yang cukup tinggi pada Januari 2021. Tercatat ada sekitar 840 kasus positif baru COVID-19 yang terjadi dalam satu bulan ini (Januari 2021).   | Bagaskara, 2021)                             |             | pada Januari 2021. Selama Januari 2021, 21 orang meninggal positif COVID-19. Jumlah itu bahkan menjadi angka yang tertinggi selama pandemi COVID-19 di Kuningan. Untuk itu, di sisa masa pelaksanaan PPKM di Kuningan hingga 8 Februari, perlu dilakukan langkah tindak lanjut sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni dengan memetakan sebaran zonasi secara menyeluruh baik itu di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa. |
| 4. | Menurut Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kuningan yaitu Agus Mauludin dengan penambahan 3 orang di Kuningan, kasus positif COVID-19 hingga Mei 2021 berjumlah 5.760 orang. Adapun rincian dari 5.760 orang tersebut adalah 481 orang yang karantina, 140 orang meninggal dunia, dan 5.154 orang sembuh dari COVID-19. | Berita dari detik.news oleh (Mustawan, 2021) | 25 Mei 2021 | Selah satu pihak yang tidak lelah membantu pemerintah dalam memerangi virus COVID-19 adalah Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Mereka selalu sigap melakukan penyemprotan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kuningan. Pada Minggu 25 Mei 2021, petugas Damkar melakukan penyemprotan cairan <i>desinfektan</i> sebanyak 4.500 liter di Kelurahan/Kecamatan Kuningan.  |

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total kasus sementara COVID-19 dari awal Maret 2020 hingga Mei 2021 di Kabupaten Kuningan mencapai angka 16.330 dengan rincian 777 karantina, 195 meninggal, 15.358 sembuh, 46 reaktif, 10 *probable* dan 139 positif. Maka dari itu pemerintah Kabupaten

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kuningan berupaya untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 melalui vaksinasi massal di setiap kecamatan di Kabupaten Kuningan. Dikabarkan pendistribusian 7.720 vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Rabu, 27 Januari 2021. Vaksin tersebut akan dikirim ke gudang farmasi dengan pengawalan ketat aparat keamanan sebelum dikirim ke 15 puskesmas yang tersebar dan telah ditunjuk menjadi lokasi vaksinasi. Kebijakan Pemerintah Pusat atas pengiriman vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ke Kabupaten Kuningan mendapat anutias yang luar biasa dari masyarakat. Dengan demikian, diterimanya vaksin ini bisa menjadi langkah konkrit dalam rangka penuntasan wabah COVID-19. Kegiatan vaksinasi ini diprakarsai oleh 10 pejabat dan tokoh masyarakat di Kuningan seperti Wakil Bupati Kuningan, Kepala BPBD, Kapolres Kuningan, Dandim, dan beberapa Pejabat daerah akan menjadi orang-orang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19. H. Acep Purnama, S.H., M.H. selaku Bupati kabupaten Kuningan meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mendukung program vaksinasi ini sebagai upaya memutus mata rantai pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini. Ia menegaskan, vaksin ini aman digunakan dan telah memenuhi standar persyaratan, mulai dari uji keamanan dan kehalalannya oleh BPOM.

Optimis negara Indonesia mulai tersiar sejak pemerintah berupaya untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara untuk mengatasi masalah COVID-19. Indonesia yakin dapat bebas dari pandemi COVID-19 pada tahun 2022 (Kemenkes, 2020). Saat proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, semua pihak yang terlibat memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam penanganannya terlebih perubahan virus juga harus selalu diamati. Upaya pemerintah dalam pengayaan vaksin harus mempertimbangkan faktor keamanan vaksin, terutama dalam proses uji klinis vaksin. Segala upaya dilakukan Negara untuk menghadapi COVID-19 mengingat karena obatnya (vaksin) memang belum sepenuhnya diberikan kepada seluruh masyarakat. Vaksinasi akan dikatakan berhasil apabila 70% dari seluruh warga negara Indonesia sudah mendapatkannya. Vaksin bukan jalan keluar yang terbaik, tetapi upaya mendatangkan vaksin merupakan upaya terbaik Pemerintah untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakatnya. Dengan

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



adanya vaksinasi, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dapat memiliki harapan tinggi untuk cepat bangkit menghadapi pandemi ini, negara segera pulih dari keterpurukan, negara dapat memperbaiki sendi-sendi kehidupan baik itu dibidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya serta negara dapat kembali normal seperti sedia kala.

Melihat data-data dan fakta-fakta yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kuningan dalam mengemban tanggung jawab serta kewajibannya untuk memenuhi hak warganya untuk mendapatkan kesehatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Akses Vaksin COVID-19 terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membagi masalah pokok kedalam beberapa sub masalah untuk mempermudah pembahasan penelitian. Agar pokok permasalahan lebih terperinci, maka penulis menjabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum Negara dan jaminan konstitusi pemerintah Kabupaten Kuningan terkait vaksin COVID-19 dalam pemenuhan hak warga negara?
- b. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam mengatasi kesimpangsiuran informasi terkait vaksin COVID-19 di sosial media?
- c. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga negara dalam mencapai *herd immunity*/kekebalan kelompok pada masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terkait upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga negara.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, peneliti juga memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu:

- a. Mendeskripsikan perlindungan hukum Negara dan jaminan konstitusi pemerintah Kabupaten Kuningan terkait vaksin COVID-19 dalam pemenuhan hak warga negara.
- b. Mengetahui komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dalam mengatasi kesimpangsiuran informasi terkait vaksin COVID-19 di sosial media.
- c. Mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga negara dalam mencapai *herd immunity*/kekebalan kelompok pada masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, Peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi Peneliti maupun bagi khalayak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis, praktis, kebijakan, isu serta aksi sosial. Adapun beberapa manfaat yang dapat Peneliti sampaikan adalah sebagai berikut.

### 1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis

Dari segi teoritis atau keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *body of knowledge* terutama pengetahuan dan memberikan kontribusi yang lebih mendalam terkait Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Akses Vaksin COVID-19 terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kota Kuningan). Penelitian ini juga digunakan sebagai acuan, bahan, dan sumber rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan upaya dalam pemenuhan vaksin COVID-19 bagi masyarakat untuk memperoleh hak kesehatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan

Halida Alda Intifadah, 2022

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIKAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat menjadi sumbangsih bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, para akademisi, peneliti, dan lembaga kesehatan tentang pengelolaan vaksinasi sebagai upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19.

#### 1.4.2 Manfaat dari Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan-masukan yang berguna bagi peningkatan kualitas program yang dibuat pemangku kebijakan, terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan perumusan kebijakan Vaksinasi di Kabupaten Kuningan, yaitu:

- a. Bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kuningan, penelitian dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan fungsi penting vaksin massal COVID-19 terhadap pemenuhan hak masyarakat Kota Kuningan dalam memperoleh kesehatan serta untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bagi tenaga kesehatan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dan para pelaksana penyedia vaksin COVID-19 (tenaga kesehatan) dalam pengelolaan vaksinasi sebagai upaya pemutusan mata rantai penularan COVID-19
- c. Bagi *stakeholder*, para akademisi, dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pikiran dan kajian pengetahuan dalam relevansi antara teori-teori yang ada dalam mata kuliah ilmu kebijakan publik dan *civic education* melalui program pelaksanaan kebijakan vaksin COVID-19 terhadap pemenuhan hak warga negara serta memberikan deskripsi tentang PKn sebagai salah satu instrumen bagi peningkatan kesadaran untuk melaksanakan hak-hak sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*) melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah berupa program vaksin COVID-19.

#### 1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran tentang implementasi aturan-aturan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang telah ditetapkan terhadap hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara agar selanjutnya dapat diperbaiki bila

Halida Alda Intifadah, 2022

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

belum berjalan secara optimal, ditingkatkan apabila berhasil dan dievaluasi bila kurang berhasil.

- b. Memberikan sumbangsih melalui pemaparan dari data, fakta serta analisis sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
- c. Memberikan beberapa solusi atau alternatif yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya akan berkorelasi dengan upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19.

#### **1.4.4 Manfaat Segi Isu serta Aksi Sosial**

- a. Memberikan deskripsi tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat serta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
- b. Membantu masyarakat untuk melaksanakan hak-haknya sehingga kewajibannya sebagai warga negara terpenuhi dalam upaya saling melindungi dan memproteksi diri dari virus COVID-19.

#### **1.5 Struktur Organisasi Penelitian**

Sistematika pada penulisan skripsi ini berperan sebagai hal yang menjadi dasar pedoman penulisan agar penulisan ini dapat lebih terarah, maka proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2019, maka sistematika penulisan skripsi meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi, halaman ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Sebagai bab pembuka dalam sebuah penelitian, pada bab ini berisi tentang: latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan struktur organisasi skripsi.

##### **2. Bab II Kajian Pustaka**

Halida Alda Intifadah, 2022

*UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN AKSES VAKSIN COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini membahas tentang metode penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, variabel penelitian, hipotesis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup: gambaran umum penelitian, deskripsi dari data penelitian, pembahasan dari rumusan masalah, dan analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian.

### **5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis temuan penelitian, serta implikasi dan rekomendasi bagi para pembaca, peneliti selanjutnya dan pengguna hasil penelitian.